

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0700 / E / 1986.

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/II/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/E/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
NPPK Muhammadiyah Nomor : 4050/II.209/DIT.82/1983
tanggal : 17 Februari 1983
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Prop. DIY
Nomor : 111/I.13.1/I.82 tanggal, 29 Juni 1982
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmas Kanwil Depdikbud Prop. DIY

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Prop. DIY
Nomor : 111/I.13.1/I.82 tanggal, 29 Juni 1982
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. N a m a : SMA Muhammadiyah Ngaran
 2. A l a m a t : Ngaran, Kecamatan Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 214 orang. / 7 klas.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan,
NPPK Muhammadiyah tanggal, 24 Juni 1984
Nomor : E-5/240/1982
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 1 Juli tahun : 1982

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Juli 1986.....

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodys / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 4010/I. 100/311.82/1983.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan
Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SMA MUHAMMADIYAH NGAYEN
berkedudukan di Ngayen, Genengkidul adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibentuk oleh Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengaja-
ran dan Kebudayaan Cabang : Ngayen

Daerah : Genengkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 JULI 1982 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan :

Pasal No. 4010/I. 100/311.82/1983

Wilayah No. 100/A. 40 (E-81/82)

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-terangannya yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
No. E. 11. 30/1983 tgl. 13 Februari 1983 dan
bertindak sebagai pengukuhan (aktes) pendirian Perguruan Muhamma-
diyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

6 Januari 1983

17 Februari 1983

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

PRIBADAN MUHAMMADIYAH SAMA DENGAN BADAN HUKUM, MEMILIKI